KENAIKAN HARGA BBM



Keputusan Kenaikan Harga BBM



Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan, subsidi, hingga non subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB kemarin.

Pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan pada Sabtu pukul 13.30 WIB dan langsung berlaku satu jam setelah pengumuman disampaikan. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan opsi menaikkan harga BBM rupanya dapat membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi untuk dialokasikan ke proyek infrastruktur.

Bhima juga menyampaikan jika pemerintah mengupayakan menahan harga BBM, inflasi akan tetap terjaga. Alhasil, risiko gejolak politik jelang pemilu bisa lebih minim dan daya beli masyarakat dan produktivitas industri bisa terjaga.



Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi masih akan berlanjut sampai akhir tahun 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada September 2022 sebesar 1,17% secara bulanan atau month over month (mom) atau secara tahunan mencapai 5,95% secara tahunan atau year on year (yoy). inflasi ini disulut kenaikan harga BBM di bulan September 2022



Pemerintah melaporkan bahwa beban subsidi BBM mencapai angka Rp 502.4 triliun, angka yang sangat tinggi tentunya. Dalam rangka mengurangi tekanan fiskal tersebut, di awal September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.

Kini harga Pertalite resmi naik dari Rp 7.650 kini menjadi Rp 10.000 per liter, Pertamax naik dari dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, dan Solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.



Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi (cost push inflation) yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (sekitar 50%) dan merupakan penghela utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara sektoral, sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi terutama sektor angkutan darat, angkutan laut, angkutan kereta api, jasa kurir dan pengiriman. Untuk bertahan sektor-sektor tersebut tentu saja akan menaikkan harga dan ini sudah terlihat dari kenaikan ongkos angkutan.

Kenaikan harga pada sektor transportasi pada gilirannya akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lainnya melalui dampak multiplier. Dan kita tahu kenaikan harga-harga barang yang terjadi secara serentak tersebut akan mendorong kenaikan inflasi di Indonesia



Dampak negatif akan lebih dahsyat lagi jika efek psikologis terasa lagi jika dampak psikologis dari sisi masyarakat dan pemerintah diperhitungkan. Dampak psikologis dari sisi masyarakat terjadi manakala masyarakat secara bersama-sama memiliki ekspektasi bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga di sektor-sektor lainnya.

Mengapa inflasi karena dampak psikologis bisa terjadi?
Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat di mana produsen (termasuk pedagang) menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Jadi ketika produsen menaikkan harga mereka tidak menghitung berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang/jasa tersebut.



Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar Rp 500 per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar Rp 500 per penumpang, pedagang makanan akan menaikkan harga Rp 500 per porsi, dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga Rp 500 per kg/per ikat sayur yang mereka jual.

Padahal kontribusi BBM per penumpang atau kontribusi BBM terhadap biaya makanan atau sayuran per ikat tidaklah sebesar tersebut. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga semua komoditi padahal kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan tidak sebesar kenaikan harga yang mereka lakukan.

Dari sisi pemerintah, adanya kenaikan harga BBM yang menimbulkan keresahan tersebut akan berdampak pada kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Apalagi menjelang tahun politik di mana isu kenaikan harga BBM akan dijadikan kubu oposisi untuk menurunkan popularitas pemerintah.

Sebagai penutup, dampak ekonomi dan psikologis kenaikan harga BBM harus diwaspadai oleh pemerintah. Di sinilah perlunya peran pemerintah untuk menenangkan masyarakat bahwa kenaikan harga BBM tidak perlu ditanggapi dengan kepanikan. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana

subsidi BBM akan dikompensasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak terutama untuk golongan rumah tangga menengah ke bawah.

Dana subsidi juga harus dialokasikan ke sektor-sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, misalnya untuk pembangunan irigasi, subsidi harga pertanian, pembangunan jalan, pelabuhan, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Subsidi bioenergi juga dapat dijadikan alternatif penyaluran dana kompensasi BBM sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil bisa dikurangi.



Bantuan Langsung Tunai

Subsidi Pemda

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 12.4 Triliun rencananya akan diberikan kepada 20.65 juta kelompok penerima bantuan yang diberikan sebesar 600 ribu yang diberikan secara dua tahap.

Jokowi dalam rapat
terbatas tersebut juga
meminta pemerintah
daerah untuk ikut
memberikan subsidi
"Kemendagri akan
menerbitkan aturan dan
kemenkeu juga terbitkan
aturan dimana 2% DAU
dan DBH diberikan
kepada rakyat dalam
bentuk subsidi" kata Sri
Mulyani

Subsidi Gaji

Pemerintah akan memberikan bantuan bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan dibawah 3.5 juta per bulan bantuan yang diberikan sebesar 600 ribu dengan target penerima mencapai 16 juta orang